

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari tubuh, jiwa, serta sosial yang sangat mungkin setiap individu hidup produktif dengan cara sosial serta ekonomis. Semakin berkembangnya zaman untuk memelihara kesehatan dibutuhkan biaya yang mahal, dimana dana yang harus disiapkan diperoleh dari usaha dan atau memanfaatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, keluarga dan masyarakat. Menurut (Azwar,2010).

Sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya. Dalam SJSN, terdapat JKN yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayar oleh pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan nirlaba-BPJS Kesehatan.

Menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur besar anggaran kesehatan pusat adalah 5% dari APBN di luar gaji, sedangkan APBD Provinsi dan Kab/Kota 10% di luar gaji, dengan peruntukannya 2/3 untuk pelayanan publik. Peningkatan biaya dapat berpengaruh pada akses dan mutu pelayanan kesehatan, oleh karenanya perlu diadakan peningkatan pendanaan kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan sebagai investasi sumber daya manusia, yaitu dengan pendanaan dari pemerintah yang terarah, dalam bentuk jaminan

kesehatan. Dalam mengatur masalah kesehatan diperlukan suatu badan khusus yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan, dimana pemerintah harus memberikan mutu pelayanan yang baik agar dapat tercapainya kepuasan pelayanan kesehatan. Di Indonesia telah didirikan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selaras dengan tujuan Organisasi Kesehatan Dunia dalam mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduk. BPJS Kesehatan ini merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan (Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2014).

Menurut Weinhold & Gutner (2014), Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesadaran yang sama akan pentingnya penggunaan asuransi kesehatan dan perencanaan kesehatan untuk individu maupun keluarga. Hal ini terutama berlaku pada masyarakat pedesaan di negara Indonesia. Rendahnya level literasi kesehatan dan pelayanan kesehatan diargumentasikan turut berperan bagi rendahnya kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya perencanaan kesehatan bagi diri sendiri maupun keluarga. Salah satu ciri khas dari ketidakcukupan kualitas pelayanan kesehatan pada sebagian besar wilayah pedesaan di negara berkembang adalah keterbatasan akses dan tidak efektifnya pelayanan kesehatan. Di samping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem nilai yang dianut individu juga diyakini turut berpengaruh pada partisipasi terhadap Program JKN-KIS, sebagaimana ditemukan dalam riset Rinjani & Lingardi (2016).

Dari penelitian terdahulu berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan meneliti tentang pengaruh minat masyarakat desa terhadap program JKN dan apa saja faktor yang mempengaruhi minat masyarakat desa terhadap program JKN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh minat masyarakat desa terhadap program JKN dan apa saja faktor yang mempengaruhi minat masyarakat desa terhadap program JKN?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan masalah ini adalah Untuk mengetahui pengaruh minat masyarakat desa terhadap program JKN dan apa saja faktor yang mempengaruhi minat masyarakat desa terhadap program JKN?

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat desa terhadap program JKN.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap minat masyarakat desa terhadap program JKN.
3. Untuk mengetahui pengaruh prosedur pendaftaran terhadap minat masyarakat desa terhadap program JKN.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan sebagai sarana belajar menerapkan ilmu yang telah diperoleh di studi D-III Asuransi Kesehatan.

2. Bagi Politeknik Kesehatan Malang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi mahasiswa dan dosen mengenai studi literatur tentang pengaruh minat masyarakat desa terhadap program JKN.

3. Bagi masyarakat dan pembaca

Dari penelitian ini, diharapkan masyarakat dan pembaca dapat mengetahui dan memahami serta mendapat wawasan mengenai studi literatur tentang pengaruh minat masyarakat desa terhadap program JKN.